HUKUM LAHAN PERTANIAN : MUZARA'AH.

Oleh: Siti Fadhillah Khaerani

Abstract

Ada beberapa sistem hukum lahan pertanian dalam perspektif islam, salah satunya yaitu muzara'ah. muzara'ah yaitu mengerjakan lahan (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan hasilnya di bagi dua (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya dibiayai oleh pemilik tanah. Selain itu bentuk kerjasama mudharabah dalam hal-hal antar pemilik modal dengan pekerja, maka bentuk lainnya adalah antara pemilik lahan dengan buruh tani yang disebut muzara'ah. Muzara'ah ialah memiliki lahan memberikan sebidang lahannya kepada pihak lain untuk dikelola, baik itu ditanami padi, jagung dan lain-lainnya. Sistem muzara'ah seperti yang telah disebutkan di atas merupakan sistem yang lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak. prinsip yang dipakai pada praktek muzara'ah disebut Profit and Loss Sharing System. Yang mana hasil akhir merupakan puncak dalam praktek muzara'ah. Jika, hasil pertaniannya mendapatkan banyak keuntungan, maka hasil panen dibagi antara kedua belah pihak, yaitu petani pemilik lahan dan buruh tani. Begitupun sebaliknya, apabila hasil pertaniannya mendapatkan hasil yang rendah, maka kerugiannya tersebut ditanggung bersama. Dalam realisasinya, muzara'ah sudah menjadi tradisi masyarakat dibidang pertanian.

Kata kunci: ekonomi, ekonomi islam, hukum pertanian

I. PENDAHULUAN

Ada beberapa sektor bidang penting di sektor perekonomian yang penting bagi negara berkembang, salah satu nya yaitu pertanian. Hal itu dilihat dari peran sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat negara berkembang khususnya penduduk desa. keterkaitan bidang pertanian masih dominan setiap tahunnya, sekalipun terjadi perubahan usaha dari sektor pertanian ke sektor non pertanian. Ada beberapa sektor utama yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, diantaranya sektor pertanian yang menjadi sektor utama ketiga pada tahun 2012. pernyataan ini didasarkan pada data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. sektor

pertanian menyumbang sekiranya 23.44% PDB nasional, 37.71 persen merupakan sektor industri, dan 38.85 persen merupakan sektor lainnya. Faktanya sektor pertanian masih merupakan sektor dengan segala keunggulan. salah satu problem dasar yang dihadapi sektor pertanian di Indonesia adalah ketersediaan kredit (pembiayaan), hal ini berdasarkan persepsi dari Beik dan Hafuddin pada tahun 2008. Ada banyak faktor rendahnya alokasi kredit, salah satunya pada sektor pertanian masih terdapatnya pandangan sebagian besar bankir yang melihat bahwa usaha di sektor pertanian merupakan usaha yang beresiko tinggi. Untuk itu, perlu sumber alternatif pembiayaan berbasis syariah yang Ada beberapa alternatif lain yang lebih cocok untuk digunakan pada sektor pertanian, salah satunya pembiayaan berbasis syariah. Berbagai bentuk aktivitas seperti prtanian, perikanan, perkebunan, perindustrian, danperdagangan merupakan ajakan islam dalam ibadah bermuamalah. Ada berbagai macam pendekatan pada sektor pertanian, diantaranya pendekatan formalis dan tektualis (sebagai pertimbangan secara kontekstual atau dalam kontrak yang tertulis) yang dipakai dalam memahami hukum islam yang sudah harus diganti dan diperbaiki kepada pendekatan masyarakat historis. Pendekatan seperti ini merupakan pendekatan yang bertolak ukur pada realitas pergulatan atau perengketaan manusia dan segala kepentingannya didunia namun tetap mengingat wahyu Ilahi. Tingkat pengembalian yang ditentukan didasarkan atas hasil yang diperoleh pada satu kali panen, bukan berdasarkan pada besarnya pinjaman, sehingga setoran pengembalian atas pinjaman akan sesuai dengan besarnya gaji petani pada masa panen tersebut. salah satunya bentuk pembiayaan berbasis syariah yaitu bagi hasil pertanian atau disebut dengan muzara'ah. sistem ini telah berjalan di zaman kekhalifahan Rasulullah Saw, dan juga dilakukan oleh khalifah-khalifah penerus beliau dan para sahabat beliau. Muzara'ah pada masa Rasulullah dilakukan antara pihak pemilik lahan dan pekerja lahan dengan bagi hasil atas panen sebesar setengah, sepertiga, atau menurut persetujuan kedua pihak.

II. PEMBAHASAN

A. Muzara`ah

1. Pengertian Muzara`ah

Pengertian Muzara'ah merupakan hubungan kemitraan antara orang yang memiliki lahan dengan penggarap tanah berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang totalnya menurut kesepakatan kedua pihak, namun biasanya pembagian hasil kadang tidak sesuai dengan

kesepakatan untuk pemilik lahan dan penggarap tanah (petani buruh)”. Dibandingkan dengan ijarah, metode muzara’ah lebih memberikan keuntungan dari pada sistem ijarah (sewa tanah), baik bagi pemilik lahan maupun bagi penggarapnya. Sebab pemilik lahan bisa mendapat bagian dari hasil (muzara’ah) ini, yang jumlahnya lebih menguntungkan dari uang sewa tanah, sedangkan buruh tani tidak banyak mengalami kerugian dibandingkan saat menyewa tanah, apabila ia mengalami gagal panen.

2. Syarat-syarat Muzara’ah

Syarat-Syarat muzara’ah Menurut jumhur ulama, syarat-syarat muzara’ah, menurut jumhur ulama yaitu ; terdapat antar orang-orang yang berakad, terdapat benih yang akan diolah, tanah yang akan dikelola, hasil yang nantinya akan dipanen, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan.

- a. Syarat orang yang melakukan perjanjian yaitu, harus sudah berumur baligh dan tidak gila, agar mereka dapat bertindak dalam konteks hukum. ulama mazhab Hanafi mengatakan, ada beberapa syarat lain selain syarat tersebut seperti bukan orang yang meninggalkan islam, karena tindakan orang yang meninggalkan islam dianggap Mauquf, yaitu tidak memiliki efek hukum, seperti saat ia masuk islam kembali. tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy- Syaibani, tidak sepakat dengan syarat tambahan itu dikarenakan perjanjian muzara’ah tidak digunakan oleh sesama muslim saja, tetapi juga boleh antara muslim dengan orang yang bukan muslim.
- b. Syarat yang berhubungan dengan benih yang akan dikelola harus jelas dan terdapat hasilnya.
- c. Syarat yang berkaitan dengan tanah yang akan digarap adalah: Lahan itu bisa diolah dan mendapatkan hasil, sebab ada tanaman yang tidak cocok atau tidak sesuai untuk ditanam ditempat tertentu; terdapat batas-batas lahan yang jelas. Lahan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada buruh tani untuk digarap dan pemilik tanah tidak boleh mencampuri proses pengelolaannya.
- d. selain syarat syarat diatas, ada juga syarat yang bertautan dengan hasil, yaitu: Hasil panen harus dibagi dengan jelas; keuntungan hasil panen itu harus benar benar menjadi milik bersama kedua pihak, tanpa pengecualian seperti dipisah lebih dahulu beberapa persen; Bagian kedua pihak dari satu jenis barang yang sama; Bagian kedua pihak sudah

bisa diketahui; Tidak diperbolehkan untuk salah satunya penambahan yang diluar perjanjian.

- e. waktu pada perjanjian pun harus jelas, sehingga tidak ada dirugikan seperti membatalkan perjanjian sewaktu-waktu. ada beberapa syarat, yaitu; waktu yang sudah disepakati; Waktu yang kemungkinan digunakan untuk menanam tanaman yang sudah disediakan; waktu tersebut dapat dijalankan oleh kedua pihak.
- f. alat-alat dalam muzara'ah pun memiliki syarat-syarat yaitu; alat-alat tersebut dalat berupa hewan atau yang lain yang menjadi tanggung jawab pemilik lahan.

3. Rukun-rukun Muzara`ah

Rukun-rukun Muzara'ah rukun rukun yang memperbolehkan muzara'ah menurut jumhur ulama, yaitu sebagai berikut :

- a. Yang menggarap lahan dan pemilik lahan atau disebut akid. Akid ialah orang yang mengajukan akad, akid memiliki peran sebagai pengelola atau yang memiliki tanah. Para mujtahid bersepakat kalau perjanjian muzara'ah dianggap boleh atay sah jika dilakukan oleh: individu yang telah mencapai baligh, seseorang yang berakal sempurna atau disebut waras, dan seseorang yang telah mampu berusaha; apabila tidak dapat terlaksana akad muzara'ah di atas yang tidak berakal dan anak yang belum baligh dan belum pandai, maka apabila melakukan perjanjian tersebut dapat terjadi dengan tanpa adanya pernyataan diizinkan. Hal ini dapat dilakukan apabila ada izin dari walinya. Bagi kedua pihak yang melaksanakan perjanjian disyaratkan memiliki kemampuan yaitu keduanya tidak gila dan dapat membedakan perjanjian tersebut. Jika salah satunya yang berakad itu tidak waras atau anak kecil tersebut belum bisa membedakan, maka akad itu dinyatakan tidak sah. Ada juga kaitannya dengan orang yang masih berakal , yaitu orang yang berakad dapat dimintai pertanggungjawaban, dan mampu membedakan yang buruk dan baik. Terlihat bahwa orang itu telah mampu mengmanej harta bendanya.
- b. Obyek muzara'ah (ma'qudilaih) Ma'qudilaih merupakan benda yang bertindak pada hukum perjanjian atau barang yang dijadikan tujuan pada kesepakatan. Ini ditetapkan sebagi rukun sebab kedua pihak sudah mengetahui bentuk barangnya, harganya dan manfaat apa yang diambil, serta sifat keduanya. Jika tanah belum diketahui kecuali

dengan dilihat seperti pekarangan, maka tidak diizinkan hingga dilihat terlebih dahulu. Serta tidak boleh selain atas tanah-tanah yang memiliki manfaat atau subur. Kesuburan lahan lahan itu dapat dilihat dari penggunaan lahan tersebut pada tahun sebelumnya atau dapat memakai alat pengukur kualitas kesuburan tanah. Ini dilakukan agar menghindari kerugian(baik biaya maupun tenaga) dari kedua pihak yang berkesempatan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjanjian bermitra yang berkaitan dengan lahan antara lain, yaitu: tanah tersebut digunakan untuk apa? Jika tanah itu dipakai untuk bertani, maka harus dijelaskan, dalam akad jenis tanaman seperti apa yang harus ditanam dilahan tersebut. Karena jenis tanaman yang ditanam akan mempengaruhi kesepakatan (sewa) tersebut. Dan akan berpengaruh terhadap uang sewa tanah itu. Pemanfaatan yang tidak jelas dalam kesepakatan, ditakutkan akan memunculkan prestasi yang berbeda antara pemilik tanah dengan penyewa atau buruh tani, dan akhirnya akan menimbulkan pertengkaran.

- c. Harus ada ketentuan bagi hasil berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan muzara'ah perlu diperhatikan ketentuan bagi hasil seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, lebih sedikit atau lebih banyak dari itu. Hal ini harus diketahui dengan pasti. Sebab problem yang sering terjadi dikawasan orang dewasa dalam dunia perserikatan ialah problem yang berkaitan dengan pembagian hasil serta waktu pembayaran upah. Pembagian hasil harus berdasarkan dengan kesepakatan kedua pihak.
- d. Ijab dan Qabul akad akan terlaksan jika ada ijab dan qabul, baik itu dalam bentuk perkataan (lisan) atau persyaratan (tulisan) yang memperlihatkan adanya kesepakatan kedua pihak dalam melakukan perjanjian tersebut. Ijab dan Qabul yaitu ikatan antara pemilik lahan dan orang yang mengelolanya.

4. Hal-hal yang Membatalkan Muzara'ah

Manusia mempunyai beberapa binatang untuk ditenak seperti sapi, kerbau, kuda dan lainnya. Mereka sanggup untuk bertani serta berkebun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak memilki lahan. Begitu pula sebaliknya, banyak diantara individu manusia yang mempunyai tanah, ladang, sawah dan lainnya, yang layak untuk dikelola (bertani), namun ia tidak mempunyai binatang untuk membajak sawah dan ladangnya atau ia sendiri tidak mempunyai waktu untuk mengerjakannya, sehingga ia mengajukan

penawaran kerja sama dengan pihak lain untuk mengerjakannya, dalam istilah ekonomi syariah disebut dengan al-muzara'ah.

Ada banyak hal yang menjadi sebab batalnya muzara'ah, diantaranya yaitu;

- a. Masa muzara'ah telah selesai, berarti masa telah disepakati oleh orang yang bersangkutan telah habis, maka muuzara'ah yang dilakukan oleh mereka itu secara otomatis berakhir. Jika diantara kedua pihak akan melanjutkan muzara'ah itu, mereka harus melakukan akad lagi.
- b. Salah satu pihak yang melakukan kesepakatan meninggal dunia. Bila salah satu diantara mereka meninggal dunia maka perjanjian muzara'ah yang telah dilakukan atau yang baru akan dilakukan secara otomatis berakhir atau tidak berlaku, sebab muzara'ah adalah kesepakatan kemitraan dalam hal bertani, jadi kedua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing.
- c. Adanya uzur Menurut ulama Hanafiyah, ada beberapa uzur yang menyebabkan batalnya muzara'ah, diantaranya menurut ulama Hanafiyah yaitu; tanah yang disepakati terpaksa dijual, misalnya untuk keperluan pemilik atau untuk membayar utang. Buruh tani tidak bisa mengelola lahan, dikarenakan sakit, jihad di jalan Allah SWT dan lain sebagainya.

5. Peran Muzara'ah

Ada berbagai bentuk peran muzara'ah, salah satunya sebagai problem solver yakni sebagai benteng dan kemungkinannya digunakan pada masa teknologi informasi, serta muzara'ah sebagai kesepakatan transaksi penggarapan tanah dan bagi hasil atas hasilnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa orang, lembaga atau perusahaan dengan hak kepemilikan lahan yang luas akan tetapi tidak ingin, dan merasa tidak butuh atau tidak mampu mengolahnya. Bagi orang yang tidak mampu menggarap, tetapi memiliki lahan maka Islam mengajarkan dengan menyadarkan agar lahan tersebut dipergunakan dan diolah semaksimal mungkin.

B. Hukum Lahan Pertanian

1. Problema Bidang Pertanian

Indonesia adalah negara agraris, sebab sekitar 80 % dari penduduknya menggantungkan mata pencahariannya dari sektor pertanian. Namun dalam kenyataannya, komoditas pertanian ga pernah menjadi tiang utama dari perekonomian Indonesia. Nasib petani di Indonesia tidak semakin sejahtera, bahkan semakin memburuk. hal itu dikarenakan pemerintah belum pernah menjadikan sektor pertanian sebagai induk komoditas ekonomi di Indonesia. Penguasaan lahan pertaniannya makin menyempit dan sedikit, bahkan tidak sedikit yang akhirnya kehilangan hak kepemilikan lahan pertaniannya dan beralih menjadi buruh tani.

2. Akar Masalah Bidang Pertanian

Berikut 4 unsur yang menjadi penentu berlangsungnya aktivitas pertanian, yaitu:

- a. Tenaga dan ketrampilan manusia.
- b. Alat produksi pertanian.
- c. Sarana produksi (saprodi) pertanian.
- d. Lahan pertanian. Ada beberapa hal yang bukan merupakan asas dalam bidang pertanian, melainkan hanya sarana saja. diantaranya tenaga manusia, alat produksi dan saprodi hanyalah. yang menjadi pokok dalam bidang pertanian adalah lahan pertanian.

3. Problem Lahan Pertanian

- a. banyak persoalan yang menjadi problem tak berujung atau tidak ada habisnya, salah satunya mengenai masalah lahan pertanian.
- b. dapat dikatakan bahwa, sepanjang sejarah manusia, masalah penguasaan lahan pertanian selalu menjadi dinamika kehidupan manusia. Penjajahan negara, perang besar antar negara, perang antar masyarakat desa, juga merupakan mengenai masalah lahan pertanian.
- c. Termasuk di Indonesia, berbagai pertengkaran terjadi akibat perebutan lahan, terus-menerus terjadi pada kehidupan, baik itu persengketaan antar perorangan, antara perusahaan dengan masyarakat, antara negara dengan perusahaan, maupun antara negara dengan masyarakat.

4. Solusi Sistem Ekonomi Kapitalisme

- a. Dalam pengaturan penguasaan lahan pertanian, ada beberapa pandangan sistem ekonomi kapitalisme. diantaranya sebagai berikut:
- b. Setiap individu bebas untuk memiliki lahan pertanian.
- c. Setiap orang bebas untuk memanfaatkan lahannya, untuk ditanami apapun itu.
- d. Setiap orang bebas untuk mengembangkan dan menambah kepemilikan lahan pertaniannya.

5. Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme

- a. Munculnya persaingan bebas dalam kepemilikan lahan pertanian.
- b. Terjadinya ketidakseimbangan dalam penguasaan lahan pertanian.
- c. Pemilik lahan pertanian besar, akan semakin besar dan terus melakukan penambahan lahan untuk memperbesar kepemilikan lahannya.
- d. Petani pemilik lahan kecil akan semakin sedikit penguasaan lahan yang akan dikelolanya.
- e. Para petani akan kehilangan hak milik pada lahannya dan akhirnya hanya menjadi buruh tani.
- f. Puncaknya adalah terjadinya feodalisme dalam bidang pertanian.

6. Solusi Sistem Ekonomi Sosialisme

- a. Sosialisme melihat bahwa penyebab utama terjadinya ketidakmerataan dalam hak kuasa lahan pertanian adalah feodalisme.
- b. jalan keluarnya yaitu: dihilangkannya hak kepemilikan secara mutlak perorangan.
- c. mengenai aspek produksi, penjualan, distribusi, serta penentuan upah rakyatnya dalam bidang pertanian itu di atur oleh negara.
- d. Sebagian masyarakat memandang hanya hak milik lahan produktif yang tidak diperbolehkan, sedangkan kepemilikan lahan konsumtif diizinkan.
- e. masyarakat yang lain menganjurkan land reform (pembagian kembali secara merata seluruh lahan pertanian di suatu negara).

7. Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme

- a. Menjadikan produktivitas pertanian negara sosialis menjadi menurun dibanding negara Eropa yang kapitalis.
- b. Penyebabnya adalah tidak adanya motivasi mengelola dari masyarakat, sehingga dihilangkannya hak kepemilikan dan upah buruh yang tidak tinggi oleh negara.
- c. Diterapkannya sistem land reform, yang tetap mengakibatkan terjadinya hal yang sama.
- d. Dihapuskannya hak kepemilikan dan land reform adalah ketidakadilan terhadap rakyat, sebab telah mencabut hak kepemilikan lahan.

8. Solusi Menurut Akal Manusia

- a. Sistem Ekonomi Kapitalisme: Kepemilikan lahan pertanian adalah bebas.
- b. Sistem Ekonomi Sosialisme: Kepilikan lahan pertanian ada 3 kemungkinan:
 - Kepemilikan lahan dilarang secara keseluruhan.
 - Hanya kepemilikan lahan pertanian saja yang dilarang.
 - Kepemilikan lahan pertanian dibagi rata (land reform).

9. Solusi Sistem Ekonomi Islam

- a. Apakah Sistem Ekonomi Islam akan mampu menyelesaikan dua problem di bidang pertanian tersebut sekaligus?
- b. Dua problem tersebut adalah
- c. Problem feodalisme (dari sistem ekonomi kapitalisme)
- d. Problem demotivasi berproduksi (dari sistem ekonomi sosialisme)
- e. Solusi dari sistem ekonomi Islam yang diperoleh dari metode induktif (istiqrô'i) adalah hukum syari'at yang bersifat umum, yaitu: penyatuan kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya.

10. Proses Induksi (istiqrô'i)

- a. Solusi Hukum Syari'at umum di atas di-induksi dari tiga hukum Syari'at sekaligus, yaitu
- b. Hukum menghidupkan tanah mati (ihya'u al- mawat).
- c. Hukum larangan menterlantarkan lahan pertanian selama lebih tiga tahun.
- d. Hukum larangan menyewakan lahan pertanian.

- e. Dari tiga hukum Syari'at tersebut, ditarik hukum syari'at yang bersifat umum, yaitu: penyatuan kepemilikan lahan pertanian dengan produksinya.

11. Solusi Terhadap Dua Problem Pertanian

- a. Peningkatan produksi pertanian dalam perspektif syariah memberi kebebasan bagi perorangan untuk memiliki lahan seberapa luas dan banyaknya, selama masih mampu mengelolanya. sehingga diharapkan tidak ada lahan kosong yang tidak dikelola, agar semua lahan diharapkan akan produktif. Islam juga memberikan kebebasan dalam pengembangan komoditas pertanian untuk menjamin terjadinya diversifikasi di bidang pertanian. Dengan adanya hak milik perorangan, produktivitas pertanian terus bertambah, karena motivasi berproduksi tetap terjaga. Problem rendahnya produktivitas, karena demotivasi berproduksi sebagaimana dalam pertanian sosialisme, dapat teratasi.
- b. Pemerataan ekonomi di bidang pertanian Adanya larangan menterlantarkan dan menyewakan lahan pertanian, keserakahan dalam kepemilikan lahan dapat dicegah. Peluang bagi buruh tani untuk mendapatkan lahan pertanian pribadi juga akan semakin mudah. Keterampilan (skill) petani mendapatkan penghargaan yang tinggi. Bagi pemilik lahan luas, apa bila tidak bisa mengelola lahannya, dapat mengupah petani, namun tentu dengan upah yang tinggi. Jika tidak ingin, petani bisa menunggu 3 tahun untuk memiliki lahan yang tidak terkelola, dengan jalan menggarapnya. Problem feodalisme dapat teratasi, sehingga pemerataan ekonomi di bidang pertanian dapat diwujudkan.

III. KESIMPULAN

Dalam perspektif islam, muzara`ah melakukan system perjanjian atau akad kedua pihak dalam melakukan kegiatan usaha. Pembagian hasil dari keuntungan tersebut merupakan perjanjian muzara`ah. Dalam aturan syariah, aturan lahan pertanian yaitu pembagian hasil harus disepakati terlebih dahulu pada akad. Dalam pola muzara`ah dibutuhkan orang yang diajak kerja sama sebagai bentuk pemberian bersama berupa tenaga dan benda untuk mewujudkan harapan bersama. Rekan kerja menuntun diberlakukannya kerja sama lahan pertanian dengan peran sebagai penyedia sarana atau

lahan, tenaga atau sumber daya manusia, sedangkan pihak lainnya sebagai mitra biaya, sarana, atau penyedia modal. Hubungan rekan kerja dalam berusaha dan bekerja sudah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk saling memberiagar kerja sama bukan hanya sekedar pada merincikan biaya laba dan keuntungan tetapi juga menciptakan hal baru yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis, D. (2017). Analisis Pendapatan Petani Penggarap dengan Akad Muzara'ah dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* , II, 1-2.
- Rafly, M. (2016). Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam. *Jurnal Hukum* , II, 220-222.